



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013 - 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 62521

Email: bpmpp@banyumaskab.go.id

Website: www.bpmpp.banyumaskab.go.id

P u r w o k e r t o



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521
E-mail: bpmp@banyumaskab.go.id Website: www.banyumasinvest.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050/ 036 /2017
TENTANG
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013 – 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPMPPTSP Kabupaten Banyumas perlu membuat Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 sebagai dasar dalam Rencana Kerja DPMPPTSP Kabupaten Banyumas untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang mana Renstra DPMPPTSP sebagai tindak lanjut dari Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas yang telah berubah Nomenklatur dari BPMPP menjadi DPMPPTSP.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas maka Renstra DPMPPTSP 2013-2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pevnanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

Pasal I

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Renca Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 25 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS



ASIS KUSUMANDANI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan rencana;
- (2) Penetapan rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DMPPTSP serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Adapun beberapa faktor pendorong lain sehingga diperlukan penyusunan rencana strategis DMPPTSP Kabupaten Banyumas 2013-2018 yaitu :

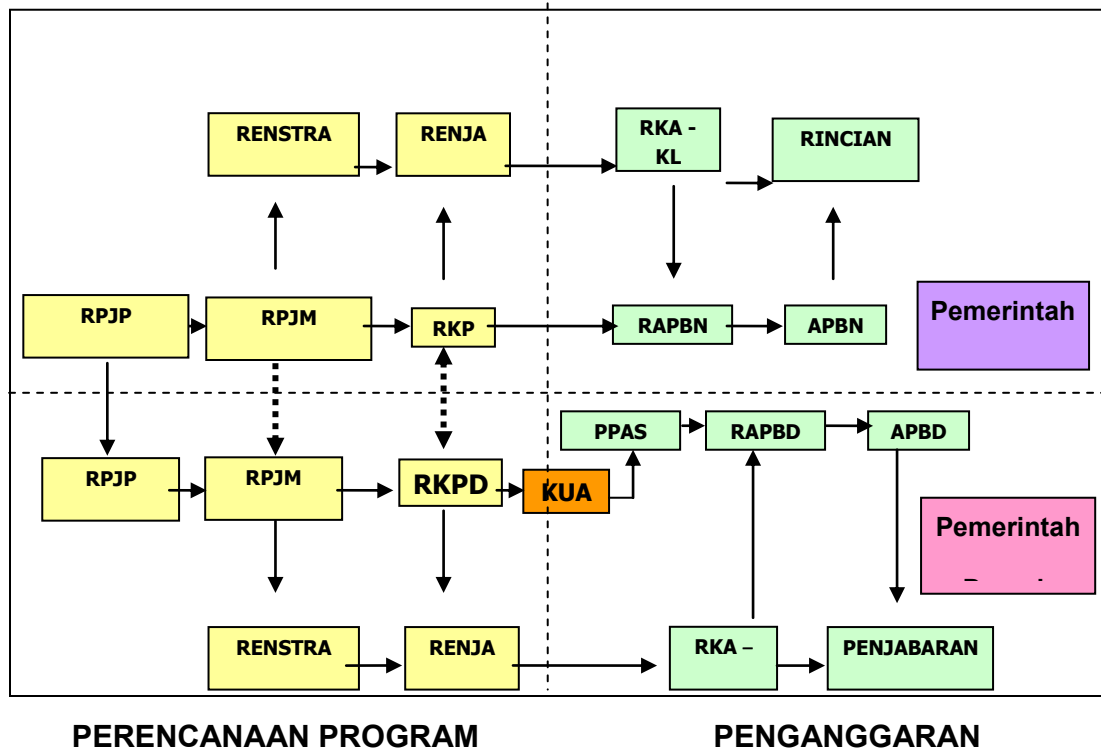
1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis selama 5 tahun ke depan.
2. Dorongan kebutuhan internal mengingat banyak kebutuhan penyesuaian kebijakan terkait pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal daerah.

Secara umum Rencana Strategis DMPPTSP Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang perizinan dan kebijakan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Renstra DMPPTSP Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018. Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program pembangunan DPMPTSP Kabupaten Banyumas ke dalam sebuah dokumen perencanaan

pembangunan yang memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tahun 2013-2018.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPPTSP Kabupaten Banyumas bertujuan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPPTSP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DMPPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 2.2 Sumber Daya DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 2.3 Kinerja Pelayanan DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DMPPTSP Kabupaten Banyumas

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi Dan Misi DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DMPPTSP Kabupaten Banyumas
- 4.3 Strategi Dan Kebijakan DMPPTSP Kabupaten Banyumas

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DMPPTSP Kabupaten Banyumas

Salah satu kegiatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DMPPTSP Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, bahwa DMPPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut DMPPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :

2.1.1 Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut DMPPTSP menyelenggarakan fungsi :

2.1.2 Perumusan kebijakan Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;

2.1.3 Pelaksanaan koordinasi kebijakan Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;

2.1.4 Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- 2.1.5 Pembinaan dan fasilitasi kebijakan Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- 2.1.6 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- 2.1.7 Pelaksanaan administrasi dinas Kesekretariatan, bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- 2.1.8 Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan aparatur yang ada di lingkungan DPMPPTSP Kabupaten Banyumas menurut golongan, jenis kelamin dan pendidikan.

No.	Gol.	Jenis Kelamin			Pendidikan						
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JML
1.	IV	4	1	5	-	-	-	-	-	5	5
2.	III	12	12	24	-	-	5	2	15	2	24
3.	II	5	4	9	-	-	9	-	-	-	9
4.	I	3	-	3	3	-	-	-	-	-	3
	JML	24	17	41	3	-	14	2	15	7	41
5.	CPNS										
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	TENAGA KONTRAK	9	2	11	1	-	2	3	5	-	11
	JML TOTAL	33	19	52	4	-	16	5	20	7	52

Menurut Eselon :

IV B	IV A	III B	III A	II B	II A
-	11	3	1	1	-

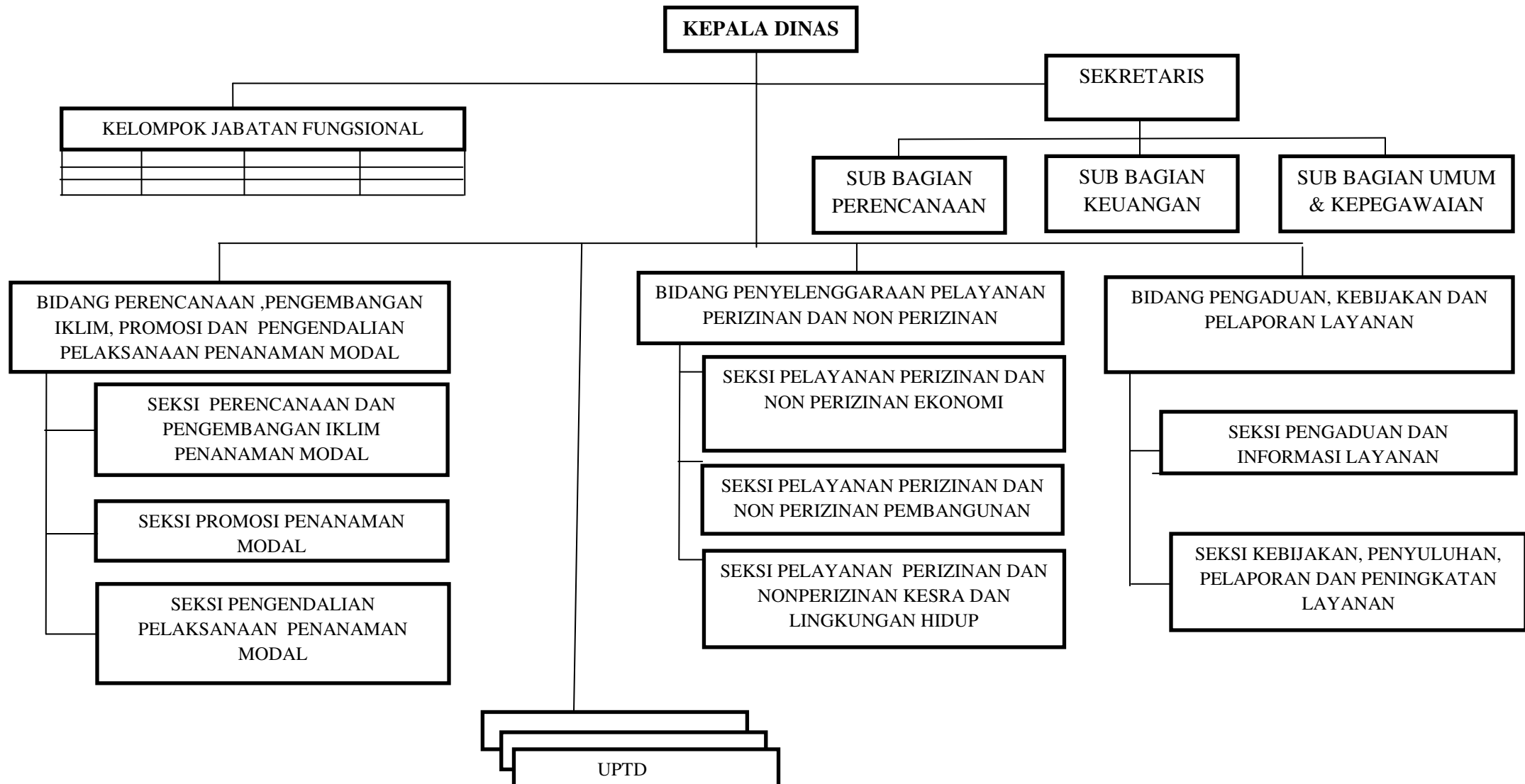
2.2.2. Sarana Prasarana :

Sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPMPPTSP Kabupaten Banyumas memiliki sarana dan prasarana seperti terlampir dalam keputusan ini :

Adapun struktur organisasi DPMPPTSP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANYUMAS
 (TIPE A)

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 66 TAHUN 2016 TANGGAL 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor unggulan).

DPMPPTSP Kabupaten Banyumas termasuk dalam urusan Wajib yaitu Urusan Wajib *Bidang Penanaman Modal*. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut maka BKPM RI menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Ada 7 Jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu:

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan 7 jenis pelayanan dasar tersebut diatas maka DPMPPTSP Kabupaten Banyumas sudah menyusun rencana dan penerapannya, disamping itu juga menetapkan target kinerja berdasarkan indikator yang terdapat di Permendagri nomor 54 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode Renstra Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Berdasar	Berdasar	Berdasar	Target Renstra SKPD Tahun					RealisasiCapaianTahun					Rasio Realisasi				
		SPM	IKK	Lainnya	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Izin Lokasi	-	14 hari		5	5	5	5	5	8	18	22	16	9					
2	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-		389	441	506	518	600	384	878	487	538	612					
3	Jumlah Nilai nvestasi berskala nasional (PMDN/PMA) (000.000)	-	588.716.435.717		230.000.000.000	235.000.000.000	240.000.000.000	245.000.000.000	250.000.000.000	380	808	999	3,100	588					
4	Jumlah tenaga kerja (org) :	-	-		5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	3,309	6,234	4,015	17,832	7,287					
5	Rasio daya serap tenaga kerja	-	7,287		10	11	11	12	13	9	7	8	33	12					
6	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	-																
7	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	-	Ada		ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada					
8	Indek kepuasan layanan masyarakat	-	-		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	77	77,69	78,27	77,25	71,64					
9	Lama proses perijinan		14 hari		14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari					
10	Kebijakan penanaman modal	1 sektor	-		1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor					

11	Kerjasama penanaman modal	1 X per Tahun			2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha	2 kali temuuusaha					
12	Promosi Penanaman Modal	1 X per Tahun			3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuat angambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuat angambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuat angambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuat angambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuat angambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3X	3X	4X	4X	4X				
13	Pelayanan penanaman modal	100 %			24 izin	24 izin	22 izin	22 izin	22 izin	24 izin	24 izin	22 izin	22 izin	22 izin				
14	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 X per Tahun			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln				
15	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %			2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org				
16	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal	1 X per Tahun			8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali				

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Analisis lingkungan strategis

Analisis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan Teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi.

- a. Faktor Kekuatan Internal (*Strenght*), adalah situasi kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas memenuhi keuntungan strategi dalam mencapai visi dan misi;
- b. Kelemahan Internal (*Weakness*), adalah situasi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tidak dapat atau gagal mencapai visi dan misi;
- c. Peluang Eksternal (*Opportunity*), adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi;
- d. Tantangan Eksternal (*Treath*) adalah faktor-faktor luar yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas gagal dalam mencapai visi dan misi.

Diharapkan dari analisis perkembangan strategi (SWOT) tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas dan tidak melibatkan kegiatan yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan :

2.4.2 Analisis lingkungan internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

- Kabupaten Banyumas letaknya yang sangat strategis sebagai daerah yang pro investasi.

- Kabupaten Banyumas sebagai kota perdagangan dan jasa terutama Purwokerto, Sokaraja, Ajibarang, Wangon, Banyumas.
 - Kabupaten Banyumas sebagai daerah agraris.
 - Tersedianya Aparatur yang berpengalaman dibidangnya;
 - Tersedianya Biaya operasional yang berasal dari APBD setiap tahunnya;
- b. Kelemahan (Weakness)
- Kurangnya persamaan persepsi dan komitmen pimpinan OPD tentang menggali potensi investasi yang ada di kabupaten Banyumas;
 - Belum optimalnya e-gov melalui aplikasi teknologi informasi pelayanan dan penanaman modal;
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang pelayanan.
 - Belum optimalnya sosialisasi system dan prosedur pelayanan.
 - Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara rencana dan tindakan.

2.4.3 Analisis lingkungan eksternal

a. Ancaman(*Threats*)

- Inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah
- Masih terjadi tarik ulur kewenangan dengan OPD teknis
- Masih ada praktek percaloan.
- Belum optimalnya koordinasi antar produk perijinan dan penanaman modal.
- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

b. Peluang(*Opportunity*)

- Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Adanya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

- Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Adanya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 11 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 12 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 13 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 14 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570/3727.A/SJ, Nomor : SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- Tersedianya fasilitas transportasi yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan mengundang investasi.
- Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luasnya wilayah, memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam (resources based industry) sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja secara luas.

- Potensi investasi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan manufaktur sebagai keunggulan daerah kompetitif.
- Hilangnya penghalang perdagangan di seluruh dunia (Globalisasi) akan bisa menjadi peluang besar jika bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki.

BAB III
ISU- ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Banyumas

Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- 3.1.1. Kurangnya Pendapatan Asli Daerah
- 3.1.2. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3.1.3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3.1.4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 3.1.5. Masih Kurangnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 3.1.6. Masih Lemahnya Disiplin Aparatur
- 3.1.7. Kurangnya Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN
- 3.1.8. Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dan Dunia Usaha
- 3.1.9. Kurangnya Fasilitasi Kerjasama Strategis antara Usaha Besar, Menengah dan Kecil
- 3.1.10. Masih Kurangnya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
- 3.1.11. Masih Kurangnya Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- 3.1.12. Masih kurangnya Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 3.1.13. Belum Optimalnya Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
- 3.1.14. Masih Rumitnya Prosedur Perizinan dan belum optimalnya pelayanan perizinan yang terintegrasi
- 3.1.15. Masih Lemahnya Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- 3.1.16. Belum Optimalnya Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
- 3.1.17. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
- 3.1.18. Masih Lemahnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3.1.19. Kurangnya kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 adalah “*Terwujudnya pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 misi, yaitu:

3.2.1. MISI 1 :

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
3. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan**
2. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi
4. Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.

3.2.2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas anak didik.
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3.2.3. MISI 3 :

Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Meningkatnya ketahanan pangan
3. Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

b. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan
4. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja
5. Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya
- 6. *Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja***

3.2.4. MISI 4 :

Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis
2. Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis

b. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah:

Meningkatnya kapasitas koperasi, **UKM** dan kelembagaan ekonomi pedesaan.

3.2.5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan ketersediaan kualitas dan kauntitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 1. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastuktur daerah
 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
 3. Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan
 4. Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni
- b. Perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 2. Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup.
 3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.2.6. MISI 6 :

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan, dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa.
 2. Meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- b. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.

- c. Perwujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat.
 2. Meningkatnya penanganan bencana.
 3. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak.
 4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

3.2.7. MISI 7 :

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa, dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kerukunan hidup beragama.
 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 3. Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisional, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.
 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- c. Pengembangan potensi pemuda dan olahraga, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra BKPM

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal 2010-2014, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Banyumas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, dengan kegiatan prioritas Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan prioritas nasional, dengan sub-indikator:
 - a. Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE; dengan target Implementasi nasional
 - b. Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE; dengan target 50 Kab/Kota dan Propinsi
2. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan kegiatan prioritas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal yang merupakan prioritas nasional, dengan sub indikator:

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, dengan target pada 2014, 2000 orang peserta untuk 4 jenis pelatihan, termasuk dasar, lanjutan I, lanjutan II dan SPIPISE.

Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2010-2014 merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 di bidang penanaman modal, dan dengan mempertimbangkan capaian Renstra 2005-2009, aspirasi masyarakat, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi.

3.3.2 Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah

- Visi : Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

Misi :

1. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal dan pengembangan kerja sama antar daerah/pelaku usaha.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal secara profesional.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan Penanaman Modal.
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Penanaman Modal.
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran Penanaman Modal.
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang Penanaman Modal.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Faktor penghambat:

- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukannya dengan RT RW.
- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi untuk usaha sudah tidak sesuai lagi dengan RT RW yang baru.
- Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku setiap pelaku usaha baik yang akan memproses izin maupun tidak, wajib membuat dokumen lingkungan hidup. Sehingga apabila akan memroses perizinan harus sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen lingkungan hidup tidak mengganggu proses pelayanan izin.

Faktor Pendorong:

- Regulasi : Telah ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas
- Sudah adanya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan
- Sudah diberlakukan Pelayanan perizinan secara online

3.5. Penentuan isu – isu Strategis

Dengan mendasarkan pada identifikasi permasalahan, Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementrian/Lembaga, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup maka ditentukan Isu-isu Strategis, sebagai berikut :

- 3.5.1 Kurang Optimalnya Pendapatan Asli Daerah
- 3.5.2 Belum maksimalnya pelayanan administrasi perkantoran
- 3.5.3 Kurang Lengkapnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3.5.4 Kurang optimalnya kapasitas sumber daya aparatur
- 3.5.5 Belum Optimalnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 3.5.6 Kurangnya SDM yang menguasai IT
- 3.5.7 Belum maksimalnya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
- 3.5.8 Belum maksimalnya Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha
- 3.5.9 Kurangnya Fasilitasi kerjasama strategis antara Usaha besar, menengah dan Kecil

- 3.5.10 Belum maksimalnya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
- 3.5.11 Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah
- 3.5.12 Belum maksimalnya penyelenggaraan pameran investasi
- 3.5.13 Belum optimalnya kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
- 3.5.14 Kurangnya penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
- 3.5.15 Kurangnya pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- 3.5.16 Masih kurangnya kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
- 3.5.17 Masih lemahnya fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
- 3.5.18 Masih kurangnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 3.5.19 Masih kurangnya kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

BAB IV

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi DPMPPTSP Kabupaten Banyumas

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan. Berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh pegawai di jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah dirumuskan bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah

"Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal yang Pro Investasi untuk mendukung Kabupaten Banyumas yang berdaya saing".

Pelayanan Penanaman Modal adalah dalam bentuk perizinan dan non perizinan.

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelayanan non perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berdaya saing yaitu suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi dari DPMPPTSP Kabupaten Banyumas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan daya tarik penanaman Modal dan kerjasama lintas stakeholders
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

4.2.1 **Misi Pertama** : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

Sasaran :

Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

Indikator Kinerja Sasaran :

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.2.2 **Misi Kedua**: Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan kerjasama lintas stakeholders

Tujuan:

Meningkatkan Investasi Daerah

Sasaran

Meningkatnya realisasi investasi, PMDN/PMA, dan tenaga kerja

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Jumlah Investor (PMDN dan PMA)
2. Nilai Investasi
- 3 Rasio daya serap tenaga kerja

4.2.3. **Misi Ketiga** : Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal.

Tujuan :

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif

Sasaran :

Terpantaunya iklim investasi dan realisasi investasi

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Jumlah Pantauan Penanaman Modal
2. Jumlah aduan perizinan yang terselesaikan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja SKPD beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran disajikan Pada tabel sebagai berikut :

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS

VISI DPMPTSP Kabupaten Banyumas : Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal yang Pro Investasi untuk Mendukung Kabupaten Banyumas yang Berdaya Saing

MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun										Kondisi Akhir RPJM 2018
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerimaan layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variabel dengan total variabel yang terisi dikalikan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut : a. Kesesuaian biaya b. Kesesuaian/ ketepatan waktu c. Kemudahan prosedur pelayanan d. Kemampuan petugas pelayanan e. Kesopanan dan keramahan petugas f. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan g. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis perzinannya h. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani i. Kedisiplinan petugas pelayanan j. Tanggung jawab petugas pelayanan k. Kecepatan pelayanan l. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan m. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan n. Keamanan pelayanan	C	B	B	B	B	B	B	B	A		

MISI II : Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan kerjasama lintas stakeholders

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun										Kondisi Akhir RPJM 2018
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatkan investasi daerah	1.Meningkatkan jumlah investor PMDN	Jumlah perusahaan	perusahaan	Jumlah realisasiPMDN/ target PMDNx 100=%	560	927	570	1.123	580	1.041	590		600		
	2.Meningkatkan nilai investasi daerah	Jumlah nilai investasi	Rupiah (Milyard)	Jumlah realisasi nilai investasi/target investasix100satuan%	230	360	235	609	240	2.738	245		250		
	3.Perluasan tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	Realisasi Jumlah Tenaga kerja/Jumlah realisasi PMDN =prosen	10	9	11	12	11	12	12		13		

MISI III : Meningkatkan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Pengukuran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun										Kondisi Akhir RPJM 2018
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Peningkatan iklim Investasi yang Konsusif	Terpantaunya iklim Terpantaunya iklim investasi dan realisasi investasi	jumlah Pemantauan Penanaman Modal	perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terpantau /jumlah target Perusahaan x100 satuan%	60	84 (140%)	70	107 (152%)	80	124 (155%)	90		100		400
		Jumlah aduan yang terselesaikan	Prosentase	Aduan yang terelesaikan/jumlah aduan yang masukx100 satuan%	100%	46 Aduan (100%)	100%	37 Aduan (100%)	100%	46 Aduan (100%)	100%		100%		100%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas merupakan pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang, meliputi; kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk mencapai misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat (*stake holder*)

4.3.1. Strategi

- (1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama Penanaman Modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal dan perizinan secara professional;
- (3) Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman modal di wilayah kabupaten Banyumas;
- (4) Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
- (5) Meningkatkan kualitas perencanaan Penanaman Modal yang terpadu dengan pendekatan sektoral;
- (6) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.

4.3.2. Kebijakan

- (1) Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- (2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsive terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global

- (3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah;
- (4) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Program dan kegiatan DMPPTSP Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Renstra ini meliputi 7 (tujuh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi seluruh operasional kegiatan yang ada pada DMPPTSP Kabupaten Banyumas.

Kegiatan yang terkait dengan Program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- 1.1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.2. Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.3. Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
- 1.4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
- 1.5. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memenuhi sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan yang ada di DMPPTSP Kabupaten Banyumas, Kegiatan yang terkait dengan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- 2.1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2.2. Pemeeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2.3. Pemeliharaan rutin gedung kantor
- 2.4. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- 2.5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan SKPD serta evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja SKPD. Dengan nama kegiatan :

3.1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan membangun citra Kabupaten Banyumas sebagai daerah tujuan investasi yang menarik.

Berikut ini adalah kegiatan yang terkait dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi meliputi kegiatan :

4.1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.

4.2. Penyelenggaraan Promosi Investasi.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya pemerintah dibidang penanaman modal dan melakukan monitoring, evaluasi dan validasi data penanaman modal, serta memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel serta berkembang dan terpeliharanya jaringan *hardware* dan *website*. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang terkait dengan Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi meliputi kegiatan:

5.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal

5.2. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal

6. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi potensi penanaman modal yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang terkait dengan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah adalah meliputi kegiatan :

6.1. Penyusunan Buku Profil Potensi/Peluang Investasi Daerah

6.2. Fasilitasi Penanaman Modal

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terkoordinasi, meliputi kegiatan :

- 7.1. Mekanisme Perizinan
- 7.2. Sosialisasi Penanaman Modal
- 7.3. Kajian Prosedur Pelayanan
- 7.4. Peningkatan Pelayanan Perizinan

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Banyumas menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan pada table terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DPMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS
YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kerjanya.

Indikator kinerja DPMPPTSP yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (000)
3. Rasio daya serap tenaga kerja
4. Lama proses perizinan (hari)

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada tabel 6.1.

No	Indikator	Kondisi Tahun Awal		Target Kinerja Tahunan					Kondisi Akhir RPJMD
		2012	2013	1	2	3	4	5	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	PENANAMAN MODAL								
1.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	538	550	560	570	580	590	600	2.900
1.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyard)	3.100.484	225	230	235	240	245	250	1.200
1.3	Rasio daya serap tenaga kerja	33	9	10	11	11	12	13	13
1.4	Lama proses perizinan (hari)	14	14	14	14	14	14	14	14

BAB VII PENUTUP

Review Rencana Strategis (Renstra) DPMPPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPPTSP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.



BUKU INVENTARIS

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
PENANGGUNGJAWAB : Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
LOKASI PENANGGUNG JAWAB : Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto

NO. KODE LOKASI : 11.10.13.02.00.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Tahun Pembelian/ Penga- daan	Bahan/ Konstruksi	Asal-Usul Cara Perolehan Barang	Ukuran Barang/ (Panjang/ Lebar/Luas)	Letak/ Lokasi/ Alamat	Keadan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/Type Judul/Asal/ Jenis	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.01.03	0002	Station Wagon	Toyota / Kijang STD LG/KF80	MHF11KF8030086001 7K-0661311 R 9509 AH	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	120.000.000	Mutasi dari BAPPEDA
2	02.03.01.01.03	0001	Station Wagon	Toyota Avansa / F602RMGMSF JJ	MHFM1CA4J7K004882 DAD9999 R 9501 TS	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	125.500.000	Kend. Nopol lama R 36 A
3	02.03.01.01.03	0004	Station Wagon	ISUZU TBR54 TURBO	MHCTBR54B7K319460 E1394-60 R 9502 ES	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	123.350.000	
4	02.03.01.01.03	0001	Station Wagon	TOYOTA AVANSA / MPNP / STATION WAGON	MHFM1BA2J7K008159 DC48464 R 145 A	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	107.400.000	Pengembalian dari KPU
5	02.03.01.01.03	0001	Station Wagon	TOYOTA / RUSH 1,5G/F700RE GMDFJ	MHFF2CJ2JCK032142 DDB8644 R 36 A	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	206.447.392	Dari DPPKAD Nopol lama R 9505 SS
6	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	MH1JBE218CK230258 JBE2E - 1227339 R 9953 FH	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	11.685.655	Dari DPPKAD
7	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	MH1JBE216CK230226 JBE2E - 1227450 R 9954 FH	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	11.685.655	Dari DPPKAD
8	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M / T	MH1JBE21XCK232142 JBE2E - 1226974 R 9955 FH	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	11.685.655	Dari DPPKAD
9	02.03.01.05.01	0004	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M / T	MH1JBE217CK218988 JBE2E - 1228648 R 9956 FH	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	11.685.655	Dari DPPKAD
10	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA / HONDA NF11BID M/T	MH1JBC112AK840191 JBC1E-1843383 R 9702 FH	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	13.014.500	Mutasi dari DPPKAD
11	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Honda / C 100	MH1ND000PPK113817 NDE-1214483 R 9650 H	1993	-	APBD Kab.		-	B	1	7.500.000	KEND. OPERASIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Suzuki / A100X	MHDA100VX SJ-3008890 A100-ID-188713 R 9827 BH	1995	-	APBD Kab.		-	B	1	6.500.000	KEND. OPERASIONAL
13	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA WIN / HONDA/MCB	-MH1HABA1XVK000354 HABAE1000319 R 9610 GH	1997	-	APBD Kab.		-	B	1	2.000.000	Nopol lama H 9769 MS
14	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA C 100	MH1NFGC18YK075489 NFGCE-1075467 R 9604 BH	2000	-	APBD Kab.		-	B	1	8.000.000	
15	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	SUZUKI FK110SDK6	MH8BE4DFA7J-448099 E451-ID-448719 R 9812 DH	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	9.900.000	
16	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	SUZUKI FK110SDK6	MH8BE4DFA7J-400023 E451-ID399819 R 9722 DH	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	9.790.000	
17	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA NF100L(SUPRA FIT)	MH1HB11184K246003 HB11E-1241107 R 9817 AH	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	9.200.000	
18	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA MCB (WIN)	MH1HABD145K124650 HABDE-1123956 R 9786 BH	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	9.680.000	
19	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA/NF 100SL	NH1HB31166K374092 HB31E-1370070 R 9666 CH	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	9.800.000	
20	02.03.02.02.01	0001	Sepeda	PHOENIX	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	660.000	
21	02.06.01.01.01	0001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brother	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	1	1.980.000	
22	02.06.01.01.02	0001 - 0002	Mesin Ketik Manual	OLYMPIA Carina 3	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	3.473.000	
23	02.06.01.01.02	0001 - 0002	Mesin Ketik	Oliverty	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	550.000	
24	02.06.01.02.01	0001 - 0003	Mesin Hitung	Citizen	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	330.000	
25	02.06.01.02.01	0004 - 0005	Mesin Hitung	CASIO	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	2	300.000	
26	02.06.01.02.01	0006 - 0008	Mesin Hitung	Citizen	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	450.000	
27	02.06.01.02.11	0001 - 0003	Kalkulator	Citizen CT 600	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	375.000	
28	02.06.01.02.11	0004	Kalkulator	Citizen	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	125.000	
29	02.06.01.02.11	0005	Kalkulator	Citizen CT 600	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	100.000	
30	02.06.01.02.11	0006 - 0007	Kalkulator	Citizen	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	200.000	
31	02.06.01.02.11	0001 - 0002	Kalkulator	Citizen SDC 868 L	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	400.000	
32	02.06.01.02.11	0001	Kalkulator	Citizen	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	160.000	
33	02.06.01.02.12	0001	Mesin Penghitung Uang	NEWMARK / Bill Counter	NM-03C-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
34	02.06.01.04.01	0001	Filling Besi/Metal	Elite	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	666.700	
35	02.06.01.04.02	0001 - 0003	Rak Besi	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	3	750.000	
36	02.06.01.04.02	0001	Rak Besi	BROTHER	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
37	02.06.01.04.02	0002	Rak Besi	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	02.06.01.04.02	0003	Rak Besi	BROTHER	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
39	02.06.01.04.02	0001 - 0004	Rak Besi 5 Susun	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	4	7.400.000	
40	02.06.01.04.02	0005	Rak Televisi	Safety Glass	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	700.000	
41	02.06.01.04.02	0001 - 0004	Rak Besi	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	4	3.700.000	
42	02.06.01.04.02	0001 - 0006	Rak Besi/Metal	BROTHER	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	6	9.000.000	
43	02.06.01.04.02	0001 - 0004	Rak Besi	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	4	4.800.000	
44	02.06.01.04.02	0001 - 0004	Rak Besi	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	7.400.000	
45	02.06.01.04.02	0001 - 0003	Rak Besi	DATAFILE	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	3	6.300.000	
46	02.06.01.04.03	0001	Rak Kembang	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	950.000	
47	02.06.01.04.03	0002	Rak Buku/TV/Kembang/Gantungan Koran Aluminium	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	390.000	
48	02.06.01.04.03	0001	Almari (Rak) File Pegawai	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	750.000	
49	02.06.01.04.03	0002 - 0006	Rak Kayu	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	5	2.100.000	
50	02.06.01.04.04	0001	Filling Besi/Metal	Brother	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	800.000	
51	02.06.01.04.04	0002 - 0003	Filling Besi/Metal	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	1.400.000	
52	02.06.01.04.04	0004	Filling Besi/Metal	Elite	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	300.000	
53	02.06.01.04.04	0005	Filling Besi/Metal	Elite	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	300.000	
54	02.06.01.04.04	0006 - 0007	Filling Besi/Metal	Elite	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	600.000	
55	02.06.01.04.04	0008 - 0009	Filling Kabinet	Elite	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	3.500.000	
56	02.06.01.04.04	0002 - 0006	Filling Kabinet	Elite	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	5	12.500.000	
57	02.06.01.04.04	0001	Filling Kabinet	Brother	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	1.050.000	
58	02.06.01.04.04	0001	Filling Kabinet	Elite	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	1.275.000	
59	02.06.01.04.04	0002	Filling Besi/Metal	Brother	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
60	02.06.01.04.04	0003 - 0004	Filling Kabinet 4 Laci	Brother	-	2008	-	APBN		-	B	2	7.400.000	
61	02.06.01.04.04	0001	Filling Kabinet	DATAFILE	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
62	02.06.01.04.04	0001 - 0004	Filling Kabinet	VIP	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	6.400.000	
63	02.06.01.04.04	0001 - 0003	Filling Kabinet	Brother	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	3	5.100.000	
64	02.06.01.04.04	0001	Filling Besi/Metal	2 Laci	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.000.000	
65	02.06.01.04.06	0001	Brand Kas	COBRA	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
66	02.06.01.04.12	0001 - 0002	Lemari Buku Kaca	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	4.000.000	
67	02.06.01.04.14	0001	Kotak Saran	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	350.000	
68	02.06.01.04.14	0001 - 0003	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	Brother	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	3	7.590.000	
69	02.06.01.04.14	0004 - 0007	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	Brother	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	4	6.380.000	
70	02.06.01.04.14	0008	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	Brother	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	1	2.530.000	
71	02.06.01.05.01	0001	Papan Visuil Elektronik (TV LCD)	LG	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	22.660.000	
72	02.06.01.05.01	0001	Papan Visuil Elektronik/Digital Moving Sign Besar	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	45.203.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	02.06.01.05.10	0001	Papan Nama Data	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	1.850.000	
74	02.06.01.05.10	0001	Bagan Organisasi BPM	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	850.000	
75	02.06.01.05.10	0002	Papan Rapat	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	1.400.000	
76	02.06.01.05.10	0001	White Board Komplit	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	800.000	
77	02.06.01.05.10	0002 - 0006	White Board	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	5	1.105.000	
78	02.06.01.05.10	0001 - 0002	White Board	SAKANA	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	2	700.000	
79	02.06.01.05.10	0001	White Board	Brother	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
80	02.06.01.05.14	0001	Peta Kabupaten Banyumas	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	200.000	
81	02.06.01.05.17	0001	Mesin Absensi Wajah	Face Ditection	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	4.200.000	
82	02.06.01.05.40	0001	Neon Box 2 Muka + Tiang	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	8.000.000	
83	02.06.01.05.40	0001 - 0003	Baliho	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	44.210.500	
84	02.06.02.01.01	0001 - 0003	Lemari Kayu	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	10.650.000	
85	02.06.02.01.01	0001	Lemari File Pegawai	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
86	02.06.02.01.01	0002	Lemari Buku Kaca	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	2.150.000	
87	02.06.02.01.01	0001 - 0002	Lemari Buku Kayu Jati	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	4.300.000	
88	02.06.02.01.01	0001	Lemari File Pegawai	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
89	02.06.02.01.01	0002	Lemari Buku Kaca	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	2.900.000	
90	02.06.02.01.01	0001	Lemari Buku Kaca	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
91	02.06.02.01.01	0001	Laci Meja Kasir	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	875.000	
92	02.06.02.01.01	0002	Almari (tempat kunci)	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	250.000	
93	02.06.02.01.01	0003	Almari Arsip Kayu Jati	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	3.750.000	
94	02.06.02.01.01	0001	Almari Alat Dapur	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	6.600.000	
95	02.06.02.01.01	0002 - 0004	Almari Kayu Jati	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	3	10.500.000	
96	02.06.02.01.04	0001	Meja Locket	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	7.000.000	
97	02.06.02.01.05	0006	Kursi Komputer	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	325.000	
98	02.06.02.01.05	0007	Kursi Komputer	Rakuda	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	325.000	
99	02.06.02.01.05	0008	Kursi Komputer	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	325.000	
100	02.06.02.01.05	0001 - 0002	Kursi Komputer	Chithos	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	2	700.000	
101	02.06.02.01.05	0001 - 0003	Kursi Kerja/Kursi Computer	CHITOSE NAN	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	990.000	
102	02.06.02.01.06	0001	Kursi Dengan Sandaran Tangan	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	300.000	
103	02.06.02.01.06	0001 - 0003	Kursi Tanganan Kayu	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	3.000.000	
104	02.06.02.01.06	0004 - 0013	Kursi Biasa Kayu	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	10	5.000.000	
105	02.06.02.01.06	0001 - 0003	Kursi Dengan Sandaran Tangan	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	3	900.000	
106	02.06.02.01.07	0001 - 0002	Zice	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	300.000	
107	02.06.02.01.10	0001 - 0008	Meja Rapat	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	8	4.750.000	
108	02.06.02.01.10	0001 - 0003	Meja Rapat Bahan Kayu Jati	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	3	3.750.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	02.06.02.01.13	0001	Meja Telpon	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	575.000	
110	02.06.02.01.17	0001	Meja Resepsion	-	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	1	9.680.000	
111	02.06.02.01.27	0001 - 0020	Kursi Rapat	FUTURA	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	20	7.260.000	
112	02.06.02.01.27	0001 - 0020	Kursi Rapat	FUTURA	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	20	8.000.000	
113	02.06.02.01.27	0001 - 0020	Kursi Rapat	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	20	6.500.000	
114	02.06.02.01.27	0001 - 0005	Kursi Rapat	FUTURA	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	5	1.250.000	
115	02.06.02.01.27	0006 - 0010	Kursi Rapat	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	5	1.250.000	
116	02.06.02.01.27	0001 - 0015	Kursi Rapat	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	15	3.000.000	
117	02.06.02.01.27	0001 - 0003	Kursi Rapat	Chitose	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	3	1.080.000	
118	02.06.02.01.27	0001 - 0005	Kursi Kerja/Rapat	FUTURA	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	5	1.550.000	
119	02.06.02.01.28	0001	Kursi Tamu	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	3.700.000	
120	02.06.02.01.29	0001 - 0009	Kursi Tangan	-	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	9	2.700.000	
121	02.06.02.01.30	0001 - 0004	Kursi Putar	-	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	4	6.600.000	
122	02.06.02.01.31	0001 - 0002	Kursi Kerja	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	1.125.000	
123	02.06.02.01.31	0003 - 0006	Kursi Biasa	Eronline	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	1.750.000	
124	02.06.02.01.31	0001 - 0003	Kursi Biasa/Kerja	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	3	525.000	
125	02.06.02.01.31	0001 - 0007	Kursi Biasa	-	-	2003	-	APBN		-	B	7	1.225.000	
126	02.06.02.01.31	0008 - 0031	Kursi Kerja Biasa	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	24	5.900.000	
127	02.06.02.01.31	0001 - 0004	Kursi Biasa Kayu Jati	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	4	72.000	
128	02.06.02.01.33	0001 - 0002	Kursi Tunggu	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	4.000.000	
129	02.06.02.01.33	0001 - 0002	Bangku Tunggu	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	700.000	
130	02.06.02.01.34	0001 - 0028	Kursi Lipat	Phoenix / Lipat	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	28	4.200.000	
131	02.06.02.01.34	0001	Kursi Lipat	Chitos	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	225.000	
132	02.06.02.01.34	0002	Kursi Lipat	Chitose	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	225.000	
133	02.06.02.01.37	0001	Meja Telepon	Melody/Furniture	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	600.000	
134	02.06.02.01.37	0002	Meja LCD	Callisto	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	550.000	
135	02.06.02.01.37	0003 - 0005	Meja Komputer	VIP	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	3	1.425.000	
136	02.06.02.01.37	0001 - 0002	Meja Komputer	Pro Design	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	1.000.000	
137	02.06.02.01.37	0001	Meja Komputer	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	400.000	
138	02.06.02.01.37	0002 - 0006	Meja Komputer	Aztec	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	5	1.250.000	
139	02.06.02.01.37	0001	Meja Komputer	Paradise	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	50.000	
140	02.06.02.01.37	0001	Meja Komputer	Pro Design	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
141	02.06.02.01.37	0001 - 0003	Meja Komputer	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	1.500.000	
142	02.06.02.01.48	0001 - 0003	Meja Kerja Biro Sedang	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	8.100.000	
143	02.06.02.01.48	0004 - 0014	Meja Kerja Setengah Biro	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	11	10.450.000	
144	02.06.02.01.48	0001 - 0002	Meja	-	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	2	1.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	02.06.02.01.48	0001 - 0015	Meja	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	15	21.000.000	
146	02.06.02.01.48	0001 - 0004	Meja Kerja	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	4	2.400.000	
147	02.06.02.01.48	0001 - 0004	Meja Kerja	osbitrend	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	3.400.000	
148	02.06.02.01.61	0001	CCTV	LG	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	10.780.000	
149	02.06.02.01.61	0002	Touc Screen	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	47.500.000	
150	02.06.02.01.61	0003	Tabung Gas	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	175.000	
151	02.06.02.01.61	0004	Kompore Gas	Quantum 211 MES	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	415.000	
152	02.06.02.01.61	0005 - 0010	Piring PC LO A 60	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	6	1.152.000	
153	02.06.02.01.61	0011 - 0015	Sendok	Doll	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	5	175.000	
154	02.06.02.01.61	0016 - 0019	Hardisk External	GoFlex	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	3.400.000	
155	02.06.02.01.61	0020	Meja Telepon	Meloy Furniture	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	600.000	
156	02.06.02.01.61	0001	Lemari Loker / Besi	BROTHER	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.200.000	
157	02.06.02.01.61	0002	Korden Vertical Blinds	Onna Biru / Vertical Blinds	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	633.600	
158	02.06.02.01.61	0001 - 0002	Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/ Garpu/Pisau	-	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	2	1.192.800	
159	02.06.02.01.61	0001 - 0002	Almari Besi 2 pintu	DATAFILE	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	2	4.300.000	
160	02.06.02.01.61	0003 - 0004	Almari Besi pintu sorong kecil	DATAFILE	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	2	4.000.000	
161	02.06.02.01.61	0005	Tempat Koran Bahan Kayu	-	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	500.000	
162	02.06.02.01.61	0001 - 0003	Kursi Tunggu	IMPORTA	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	3	5.460.000	
163	02.06.02.01.61	0001	Korden Vertikal Tipe Blind	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	19.550.000	
164	02.06.02.01.61	0002	Etalase/Sketsel	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	34.082.090	
165	02.06.02.01.61	0003	Korden/Karpet/Taplak Meja	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	446.000	
166	02.06.02.01.61	0001 - 0003	Kursi Computer	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	975.000	
167	02.06.02.02.01	0001	Jam Dinding	Seiko	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	285.000	
168	02.06.02.02.01	0001 - 0002	Jam Dinding	SEIKO OKA 327 BE	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	2	200.000	
169	02.06.02.03.03	0001	Mesin Potong Rumput	BM-7A / CJ6	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
170	02.06.02.04.03	0001 - 0002	AC	Panasonic	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	14.500.000	
171	02.06.02.04.03	0001	AC 1 PK	Panasonic	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	4.475.000	
172	02.06.02.04.03	0001 - 0002	AC 1 PK	Panasonic	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	8.500.000	
173	02.06.02.04.03	0001 - 0002	AC 1 PK	Toshiba	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	2	10.500.000	
174	02.06.02.04.03	0003	AC 2 PK	Toshiba	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	8.750.000	
175	02.06.02.04.03	0001 - 0002	AC Kapasitas 1 PK	Panasonic	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	7.000.000	
176	02.06.02.04.03	0001 - 0003	AC Unit	Panasonic	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	3	10.500.000	
177	02.06.02.04.06	0001	Kipas Angin	Panasonic	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	550.000	
178	02.06.02.04.06	0001 - 0002	Kipas Angin	Panasonic	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	1.200.000	
179	02.06.02.06.03	0001	Televisi	Sony	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	2.950.000	
180	02.06.02.06.03	0001	Televisi Berwarna 21 Inchi layar Flat	Toshiba	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	2.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	02.06.02.06.12	0001	Wireless	TOA	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	6.525.000	
182	02.06.02.06.12	0001	Wireless	KREZT / USB/ SD Record FM	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
183	02.06.02.06.23	0001	Foto Tustel	Nixon	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	3.458.000	
184	02.06.02.06.28	0001	Lambang Garuda Pancasila	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	50.000	
185	02.06.02.06.29	0001	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	50.000	
186	02.06.02.06.37	0001	Tangga Aluminium	FORTUNA	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	850.000	
187	02.06.02.06.38	0001	Kaca Hias	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	50.000	
188	02.06.02.06.38	0001	Kaca Hias	-	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	50.000	
189	02.06.02.06.38	0001	Kaca Cermin	-	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	140.000	
190	02.06.02.06.39	0001	Dispencer	Denpoo	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	1.714.900	
191	02.06.02.06.39	0001	Dispencer	SANKEN	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
192	02.06.02.06.49	0001	Handycam	Sony	-	2011	-	APBD		-	B	1	6.500.000	
193	02.06.02.06.49	0001	Handy Cam Sony	Sony	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	9.300.000	
194	02.06.02.06.50	0001 - 0002	Pot Bunga (Keramik)	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	242.000	
195	02.06.02.06.50	0003 - 0004	Pot Keramik	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	2	340.000	
196	02.06.02.06.50	0001	Layar Proyektor	Focus	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
197	02.06.02.06.50	0001	Korden/Karpet/Taplak Meja	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	320.000	
198	02.06.02.06.50	0001	Aqua Galon	-	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	75.000	
199	02.06.02.06.50	0001	Meteran Jalan	Walking Measure	-	2011	-	APBD		-	B	1	725.000	
200	02.06.02.06.50	0001	Tape Mobil	Head Unit Roger GPS	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	5.400.000	
201	02.06.02.07.01	0001 - 0003	Alat Pemadam/Portable	GUNNEBO / Ultima ABC-90 Powder	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	3	4.500.000	
202	02.06.02.07.01	0001	Alat Pemadam Kebakaran	Guardall	-	2004	-	APBD Kab.		-	B	1	850.000	
203	02.06.03.02.01	0001	Komputer DDRAM 128 MB PC 2100	SIMBADA 2X SERIES 350 W	-	2004	-	APBD Kab.		-	RB	1	4.227.000	
204	02.06.03.02.01	0001	PC Unit	Rakitan P4	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	1	10.000.000	
205	02.06.03.02.01	0001 - 0003	Computer (PC)	LG	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	3	26.700.000	
206	02.06.03.02.01	0001 - 0003	Personal Computer (PC)	Samsung	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	29.700.000	
207	02.06.03.02.01	0004	Computer (PC)	SAMSUNG	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	9.900.000	
208	02.06.03.02.01	0002 - 0003	Computer	Intel Core Duo	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	22.500.000	
209	02.06.03.02.01	0001	Personal Computer Unit (PC)	Core i5-2310 (2,9GHz,6MB)	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	7.500.000	
210	02.06.03.02.01	0001	Computer/PC	LG	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	6.500.000	
211	02.06.03.02.01	0005	Computer	HP	-	2010	-	APBD Pusat		-	B	1	12.000.000	Hadiah penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal
212	02.06.03.02.01	0006	Computer	HP	-	2010	-	APBD Prov.		-	B	1	12.000.000	Hadiah daya saing
213	02.06.03.02.01	0001 - 0003	Personal Computer (PC)	LG	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	3	24.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	02.06.03.02.01	0001 - 0006	Personal Computer Unit (PC)	ACER / Intel Core i3-3240 Processor	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	6	39.000.000	
215	02.06.03.02.01	0007 - 0009	Personal Computer Unit (PC)	Lenovo / Workstation E 31	-	2014	-	Hibah		-	B	3	39.567.525	
216	02.06.03.02.01	0001	Personal Computer Unit (PC)	SAMSUNG	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	1	7.700.000	
217	02.06.03.02.01	0001	Personal Computer Unit (PC)	ASUS / Intel i13-4030U/DDR3-2GB/500GB	-	2015	-	Pembelian		-	B	1	6.900.000	
218	02.06.03.02.01	0002	Personal Computer Unit (PC)	ASUS / Intel i13-4030U/DDR3-2GB/500GB	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	1	6.900.000	
219	02.06.03.02.02	0001 - 0002	Lap Top / Note Book	ACER / Intel Core i3-3240 Processor	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	2	15.600.000	
220	02.06.03.02.02	0001	Lap Top/Note Book	HP Presdario Compaq	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	18.000.000	
221	02.06.03.02.03	0001	Note Book	Axioo	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	6.600.000	
222	02.06.03.02.03	0002	Note Book Toshiba Dual Core	Toshiba	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	8.150.000	
223	02.06.03.02.03	0001 - 0002	Note Book (Laptop)	Toshiba	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	2	24.500.000	
224	02.06.03.02.03	0001	Note Book / IPAD	SAMSUNG / Galaxy Note 8"	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	6.200.000	
225	02.06.03.02.03	0002 - 0005	Note Book	ACER / E5-471-4005	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	4	30.600.000	
226	02.06.03.02.03	0006 - 0008	Note Book	TOSHIBA / NB10-A114	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	3	14.100.000	
227	02.06.03.02.03	0001 - 0006	Note Book / Ipad	Samsung / Galaxy Tab 38"	-	2013	-	APBD Kab.		-	B	6	33.000.000	
228	02.06.03.02.03	0001 - 0002	Laptop	Dell	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	20.900.000	
229	02.06.03.02.03	0003 - 0006	Note Book	Toshiba	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	4	30.000.000	
230	02.06.03.02.03	0001	Note Book	Acer 4741	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	7.500.000	
231	02.06.03.02.03	0001 - 0003	Note Book	Core i5-3210M (3.10GHz,3MB)	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	3	32.400.000	
232	02.06.03.03.01	0001	Card Rader	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	150.000	
233	02.06.03.03.03	0001	FDD 1,44 Mc Panasonic	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	40.000	
234	02.06.03.03.06	0001 - 0003	CPU	HP Pro / 2000MT	-	2010	-	Hibah		-	B	3	16.955.400	
235	02.06.03.03.10	0001	Kabel Head Printer	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	130.000	
236	02.06.03.03.12	0001 - 0002	Harddisk Eksternal	EXPANSION / HDD External 1 TB Seagate	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	2	2.300.000	
237	02.06.03.03.14	0001 - 0003	UPS	Power Ware / PW 5115	-	2014	-	Hibah		-	B	3	5.604.720	
238	02.06.03.04.08	0001	Printer	EPSON	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	2.100.000	
239	02.06.03.04.08	0002	Printer	CANON PIXMA iP 2770	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	615.000	
240	02.06.03.04.08	0003	Printer	HP / Laserjet P1606	-	2010	-	Hibah		-	B	1	4.048.000	
241	02.06.03.04.08	0001 - 0006	Printer	SAMSUNG / Inkjet	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	6	3.900.000	
242	02.06.03.04.08	0001	Printer	CANON PIXMA lx 4000	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	4.100.000	
243	02.06.03.04.08	0002 - 0003	Printer All One Inkjet	CANON	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	12.100.000	
244	02.06.03.04.08	0004 - 0006	Printer	CANON PIXMA iP 2770	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	3	1.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
245	02.06.03.04.08	0007	Printer Inkjet Paper Size	CANON	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	6.050.000	
246	02.06.03.04.08	0001 - 0003	Printer	HP / Laser Jet P 1505	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	3	12.000.000	
247	02.06.03.04.08	0004	Printer	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	730.000	
248	02.06.03.04.08	0005 - 0006	Printer Canon iP 1980	Canon iP 1980	-	2008	-	APBD Kab.		-	RB	2	1.100.000	
249	02.06.03.04.08	0001	Printer	Dot Matrik A4,Tinta A3 CIS/Inf	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	8.000.000	
250	02.06.03.04.08	0001 - 0002	Printer	Epson & Samsung	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	2	10.250.000	
251	02.06.03.04.08	0001	Printer	HP 3744	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	450.000	
252	02.06.03.04.08	0002	Printer	HP PSC	-	2005	-	APBD Kab.		-	B	1	1.500.000	
253	02.06.03.04.08	0001	Printer	Laserjet SamsungSCX4100	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	2.500.000	
254	02.06.03.04.08	0001	Printer	CANON BJ-2100 SP	-	2003	-	APBD Kab.		-	B	1	600.000	
255	02.06.03.04.15	0001 - 0004	Flash Disk	-	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	4	2.581.000	
256	02.06.03.04.15	0005 - 0006	Flash Disk	-	-	2007	-	APBD Kab.		-	B	2	300.000	
257	02.06.03.04.15	0001 - 0010	Flas Disk	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	10	955.000	
258	02.06.03.04.15	0011 - 0015	Flash Disk	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	5	425.000	
259	02.06.03.04.15	0002 - 0009	Flash Disk	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	8	747.000	
260	02.06.03.04.15	0010 - 0016	Flas Disk	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	7	840.000	
261	02.06.03.04.15	0001 - 0003	UPS	APC / BE525-AS	-	2010	-	Hibah		-	RB	3	1.557.600	
262	02.06.03.04.15	0004	UPS	APC / BE525-AS	-	2010	-	Hibah		-	B	1	519.200	
263	02.06.03.05.02	0001	Monitor/Display/LCD	Acer	-	2010	-	APBD Kab.		-	B	1	1.750.000	
264	02.06.03.05.02	0002 - 0004	Monitor	LCD HP / Lv 1561w	-	2010	-	Hibah		-	B	3	4.999.500	
265	02.06.03.05.02	0001	Monitor	SAMSUNG / TV Plasma	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	7.500.000	
266	02.06.03.05.02	0001	Monitor	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	950.000	
267	02.06.03.05.03	0001 - 0002	Printer	Canon / iP 2770 Colour	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	2	1.450.000	
268	02.06.03.05.03	0003	Printer	HP / Laser Jet HP 1102 Black	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	1.400.000	
269	02.06.03.05.03	0004	Printer	HP / HP 200 Color M25N	-	2014	-	APBD Kab.		-	B	1	5.000.000	
270	02.06.03.05.03	0005 - 0007	Printer	Lexmark / X 264 DN	-	2014	-	Hibah		-	B	3	12.680.679	
271	02.06.03.05.03	0001	Printer Laser Jet	HP / P 1102	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	1	1.600.000	
272	02.06.03.05.03	0002 - 0004	Printer Inkjet	CANON / iP 2770	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	3	2.100.000	
273	02.06.03.05.03	0005 - 0006	Printer Laser Jet	HP / Laser Jet P 1102	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	2	3.200.000	
274	02.06.03.05.04	0001	Printer Scanner	EPSON / L555	-	2015	-	APBD Kab.		-	B	1	5.400.000	
275	02.06.03.05.10	0001 - 0010	Kelengkapan Computer	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	10	400.000	
276	02.06.03.05.10	0001	LCD Proyektor	Toshiba	-	2005	-	APBD Prov.		-	B	1	20.000.000	
277	02.06.03.06.01	0001 - 0002	Server	Intel Xeon Processor	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	2	47.500.000	
278	02.06.03.06.02	0001	Router	Routerboard	-	2010	-	Hibah		-	B	1	495.000	

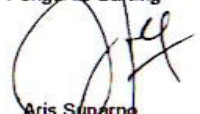
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279	02.06.03.06.04	0001 - 0003	Modem	Modem Speed Lifestyle / Speed Lifestyle	-	2014	-	Hibah			B	3	1.305.000	
280	02.06.03.06.06	0001	Connector RJ	AMP Netconnect	-	2010	-	Hibah			B	1	74.800	
281	02.06.03.06.06	0002	Kabel UTP	Tyco electronic / Campuran	-	2010	-	Hibah			B	1	935.000	
282	02.06.03.06.06	0001	Peralatan Jaringan Komputer	-	-	2011	-	APBD			B	1	1.500.000	
283	02.06.03.06.06	0001	Peralatan Jaringan Komputer	Toshiba	-	2009	-	APBD Kab.			B	1	37.070.000	
284	02.06.03.06.06	0002	Jaringan/Instalasi Internet (Wireless)	-	-	2009	-	APBD Kab.			B	1	3.000.000	
285	02.06.04.01.09	0001 - 0002	Meja Kerja	-	-	2009	-	APBD Kab.			B	2	4.902.000	Meja Kasir
286	02.06.04.01.09	0001 - 0003	Meja Kerja Loket & Komputer	-	-	2007	-	APBD Kab.			B	3	7.950.000	
287	02.06.04.02.05	0001	Meja Pejabat Eselon	-	-	2003	-	APBD Kab.			B	1	1.500.000	
288	02.06.04.03.09	0001	Kursi Putar/Kursi Kerja Pejabat Eselon	-	-	2003	-	APBD Kab.			B	1	1.500.000	
289	02.06.04.03.09	0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon	-	-	2003	-	APBD Kab.			B	1	300.000	
290	02.06.04.06.11	0001	Meja Kursi Tamu	-	-	2005	-	APBD Kab.			B	1	3.000.000	
291	02.07.01.01.03	0001	LCD Projector + Layar Motorize 70"	Focus / XGA Resolution, 2700 lumens	-	2014	-	APBD Kab.			B	1	10.750.000	
292	02.07.01.01.52	0001 - 0002	UPS/Stabilizer	-	-	2009	-	APBD Kab.			RB	2	1.200.000	
293	02.07.01.01.76	0001	Tape Mobil	-	-	2014	-	APBD Kab.			B	1	4.000.000	Di mobil R 36 A
294	02.07.01.02.03	0001 - 0003	Camera Digital	Sony	-	2011	-	APBD			B	3	16.500.000	
295	02.07.01.02.03	0001	Camera Electonic	DX Format Digital SLR	-	2012	-	APBD Kab.			B	1	18.500.000	
296	02.07.01.03.24	0001	Kamera Digital	SONY / Exmor R Cmos sensor, 18,2 MP	-	2014	-	APBD Kab.			B	1	3.000.000	
297	02.07.02.01.20	0001	Mesin Facsimile	Panasonic	-	2005	-	APBD Kab.			B	1	2.000.000	
298	02.07.02.01.24	0001	PABX	-	-	2008	-	APBD Kab.			B	1	11.250.000	
299	02.07.02.01.24	0001	Global Positioning System (GPS)	GARMIN	-	2013	-	APBD Kab.			B	1	5.280.000	
300	02.07.03.19.04	0001	Switch	D-link	-	2010	-	Hibah			B	1	203.500	
301	03.11.01.01.01	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	2008	-	APBD Kab.	520,18	ILn. Jend Sudirman 540	B	1	809.461.000	Gedung A
302	03.11.01.27.04	0001	Kanopi Ruang Advis Planing	-	-	2012	-	APBD Kab.		BPMPP Kabupaten Banyumas	B	1	5.000.000	
303	04.16.01.03.02	0001	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	-	-	2013	-	APBD Kab.		BPMPP KAB. BANYUMAS Jl. Jend. Soedirman No.540 Purwokerto	B	1	1.413.200	
304	04.16.02.02.04	0001	Instalasi Listrik	-	-	2009	-	APBD Kab.		BPMPP	B	1	49.700.000	
305	04.16.02.02.04	0001	Jaringan Komputer SPIPISE	-	027/186/2011	2011	-	APBD Kab.		Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto	B	1	18.370.000	
306	05.17.01.01.01	0001	Buku Peraturan Perundang - Undangan	-	-	2009	-	-			B	1	172.500	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
307	05.17.01.01.10	0001	Buku Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012	Buku Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012	-	2012	-	APBD Kab.		-	B	1	145.000	
308	05.17.01.04.04	0001	Buku SAP	-	-	2008	-	APBD Kab.		-	B	1	29.750	
309	05.17.01.04.04	0002	Buku Analisis Laporan Keuangan	-	-	2008	-	-		-	B	1	52.500	
310	05.17.01.04.11	0001	Buku Ilmu Sosial Lain - Lain	-	-	2009	-	APBD Kab.		-	B	1	119.000	2
311	05.17.01.04.11	0001	Buku Peraturan Perundang-undangan	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	1	250.000	
312	05.17.01.04.11	0002 - 0003	Buku Peraturan Perundang undangan	-	-	2011	-	APBD Kab.		-	B	2	53.000	
313	05.17.01.04.11	0001	Buku Peraturan Presiden No. 54	Peraturan Presiden No. 54 Penerbit CV. MINI JAYA ABADI	-	2012	-	APBD Kab.		-	-	1	108.000	
314	05.19.02.02.09	0003	Tanaman (Bougenville)	-	-	2008	-	-		-	B	1	200.000	Di usulkan penghapusan
315	05.19.02.02.09	0004	Tanaman (Bougenville)	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	1	200.000	Di usulkan penghapusan
316	05.19.02.02.09	0006 - 0007	Sansievera	-	-	2006	-	APBD Kab.		-	B	2	300.000	
TOTAL													3.295.242.976	

Purwokerto, 30 June 2015

Mengotahiri
 Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

 Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
 NIP. 19630405 198503 1 021

Pengurus Barang

 Aris Sugarno
 NIP. 19650413 198603 1 017